

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertambangan timah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Bangka selama ini. Pulau Bangka merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dengan kandungan mineral timah yang melimpah. Demikian pula dengan wilayah Bangka memiliki peran sangat strategis sebagai salah satu kabupaten penghasil timah di pulau Bangka Belitung. Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2015 setelah perubahan dengan target Rp. 1 trilyun 164 milyar lebih dapat terealisasi Rp 1 trilyun 73 miliar lebih atau 92,53 %. Pendapatan daerah tersebut diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp 129 milyar 295 juta lebih atau 94,52% dari target Rp 136 milyar 797 juta lebih serta pendapatan lainnya berasal dari pos pajak daerah, restribusi daerah dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari PT Timah, perusahaan smelter dan kapal isap senilai Rp 9 miliar. (Bangka.go.id)

Timah merupakan ekspor terbesar yaitu berperan 83,37 persen dari total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan utama ekspor timah Mei 2015 adalah Singapura yang mencapai US\$32,82 juta atau 49,04 persen dari keseluruhan ekspor timah, diikuti Belanda US\$7,44 juta (11,12 persen), India US\$5,33 juta (7,96 persen), Taiwan US\$5,11 juta (7,64 persen), dan Jepang

US\$3,64 juta (5,44 persen). Timah tersebut banyak digunakan untuk solder, industri plating, untuk bahan dasar kimia, kuningan dan perunggu, industri gelas, dan berbagai macam aplikasi lain (BPS Kabupaten Bangka).

Pengoperasian pertambangan timah dilakukan di darat maupun di laut. Awalnya pertambangan timah marak dilakukan didarat, namun seiringnya perkembangan zaman dan menipisnya sumber timah didarat mulai bergeser menuju laut.

**Tabel 1.1.** Jumlah Izin Pertambangan Tahun 2016

<b>Kabupaten</b>	<b>IUP Eksplora si Laut</b>	<b>Luas IUP Eksplorasi Laut (Ha)</b>	<b>IUP Produksi Laut</b>	<b>Luas IUP Produksi Laut (Ha)</b>
<b>Bangka</b>	8	4.085,39	28	4.895,16
<b>Bangka Barat</b>	5	11.245,62	11	11.708,90
<b>Bangka Tengah</b>	0	219,70	0	0,00
<b>Bangka Selatan</b>	0	41.774,54	0	0,00
<b>Belitung</b>	0	0,00	0	0,00
<b>Belitung Timur</b>	0	0,00	0	0,00
<b>Pangkal Pinang</b>	0	0,00	1	238,84
<b>Provinsi</b>	204	366.772,00	6	29.838,80
<b>Total</b>	217,00	424.097,25	46,00	46.681,70

*Sumber: WALHI-Friends of the Earth Indonesia*

Tabel 1.1. Di atas menjelaskan Jumlah Izin Pertambangan Tahun 2016 kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016. Terlihat

bahwa IUP Eksplorasi laut sebanyak 8 dengan luas eksplorasi 4.085,39, IUP produksi 28 dengan luas IUP Produksi dengan luas 4.895,16 Ha khususnya dikabupaten Bangka Meskipun pertambangan memiliki izin (Tabel 1.1) namun pertambangan berdampak positif dan negatif. Dampak positif bagi pemerintah yaitu terciptanya lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan khususnya di daerah tersebut. Pendapatan pemerintah juga akan meningkat dengan diberlakukannya pajak terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut (Wahyuni , Sasongko, P. Sasongko. 2013).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Produksi Bijih Timah dan Logam Menurut Kecamatan,**  
**2015**

<b>Kecamatan</b>	<b>Biji Timah (Ton Sn)</b>	<b>Logam Timah (M Ton)</b>
1	2	3
Sungailiat	1 062,840	1,111.26
Pemali	955.16	998.677
Merawang	260.97	272.86
Belinyu	2 946,508	3,080.75
Puding Besar	-	-
Riau Silip	671.23	701.811
Mendo Barat	12.2	12.756
Bakam	69.51	72.677
<b>Jumlah</b>	<b>5 978,418</b>	<b>6 250,792</b>

*Sumber : PT. Tambang Timah*

Dari tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi bijih timah dan logam menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka lebih banyak di Belinyu dengan bijih timah 2946,508 dan logam timah 3,080.75

Sedangkan dampak negative yang akibat dari pertambangan timah dilaut yaitu rusaknya lingkungan alam, tercemarnya air laut, terjangkit penyakit bagi masyarakat di daerah pesisir, rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang dan penghuni laut lainnya, penurunan pendapatan nelayan berarti menurunkan produksi ikan setiap tahunnya dan terjadi konflik antar pengusaha tambang dan nelayan. Harian Kompas (25 April 2012) menyatakan bahwa masyarakat bangka yang terdiri dari pengusaha, pelaku pariwisata, nelayan, peneliti laut, dan pemerhati lingkungan mendesak pemerintah daerah agar segera membatasi daerah penambangan timah lepas pantai yang saat ini marak di sekitar Pulau Bangka. Kerusakan lingkungan laut sejak adanya aktivitas penambangan telah merugikan sektor perikanan dan wisata di Pulau Bangka. konflik antara nelayan dan petambang timah rakyat lepas pantai kerap muncul. Bangka Pos (28 Desember 2015) Memberitakan bahwa Saat ini ada 70 lebih jumlah kapal isap yang beroperasi di perairan Bangka. Laut menjadi padat oleh aktivitas kapal isap. Produktivitas nelayan jadi terganggu dan terancam kehilangan mata pencaharian. Ada 16.000 nelayan harian dari 45 ribu nelayan mengalami akibat langsung. Hasil tangkap ikan mulai menurun dan semakin jauh diatas 5

mil mendapatkan ikan lebih banyak dan terumbu karang terancam rusak akibat salah dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

**Tabel 1.3. Luas dan Kondisi Terumbu Karang di Kepulauan Bangka Tahun 2016**

No	Kota	Luas Tutupan (ha)	Persentase Luas Terumbu Karang (%)			
			Sangat Baik	Baik	Sedang	Buruk
1	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0
2	Bangka	9.162,4	0	14,68	28,23	57,09
3	Bangka Tengah	3.376,8	0	0	100	0
4	Bangka Barat	703,2	0	100	0	0
5	Bangka Selatan	29,82	0	10	30	60
6	Belitung	25.607,2	0	100	0	0
7	Belitung Timur	9.452,2	0	60	40	0
Total		78.124,9	0	46,48	23,93	29,60

*Sumber: Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2016*

Tabel 1.3. Di atas menjelaskan luasan dan kondisi terumbu karang di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016. Terlihat bahwa Kondisi terumbu karang di Kabupaten Belitung, seluruhnya dalam kondisi baik, seperti halnya kondisi terumbu karang di Kabupaten Bangka Barat. Kondisi sedang pada terumbu karang terdapat di Kabupaten Bangka,

Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur, sedangkan terumbu karang dengan kondisi rusak terdapat di Kabupaten Bangka 57,06% dan Bangka Selatan 29,60%. Khususnya di kabupaten Bangka terumbu karang 50 persen rusak akibat aktivitas penambangan timah dilaut karena pori-pori terumbu karang tertutup limbah penambangan yaitu lumpur sehingga membuat terumbu karang rusak.

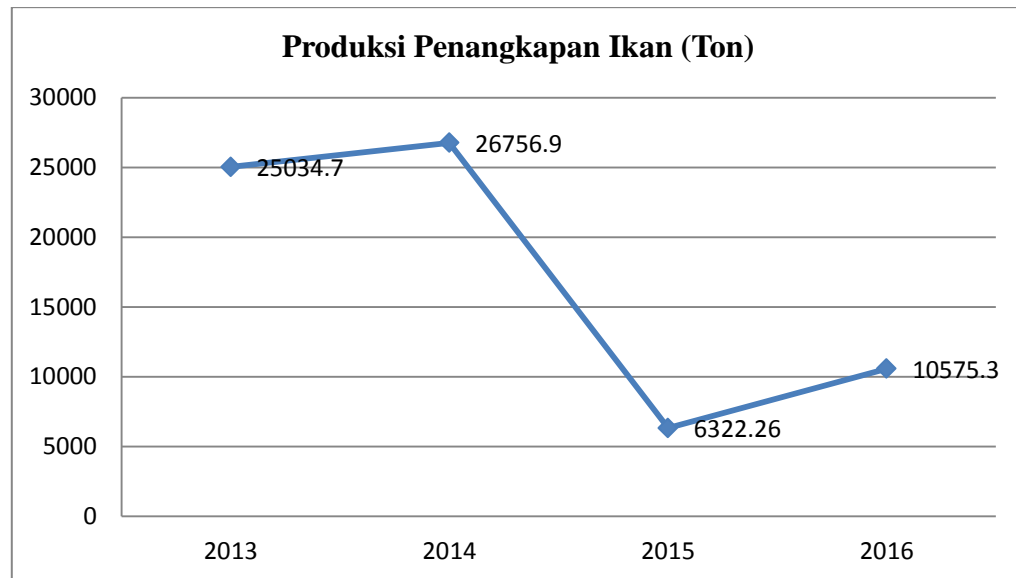
**Tabel 1.4. Produksi Penangkapan Ikan (Ton) Provinsi Bangka Belitung  
Tahun 2013-2016**

Wilayah Babel	Produksi Penangkapan Ikan (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
Kepulauan Bangka Belitung	199241	203284.4	139543	196704
Bangka	25034.7	26756.9	6322.26	10575.3
Belitung	44947.4	50134.6	43738.09	67189.2
Bangka Barat	11098.8	12642.4	14133.5	12960.1
Bangka Tengah	17559.1	16661.4	18843.9	22988.1
Bangka Selatan	44975.3	39489.6	18269.6	41309.6
Belitung Timur	37482.1	39533.1	36423.6	39593.2

*Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung*

**Gambar 1.1**

**Grafik Produksi Penangkapan Ikan (Ton) Kabupaten Bangka Tahun  
2013-2016**



*Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung*

Tabel 1.4 dan Grafik 1.1 Di atas menjelaskan produksi penangkapan Kabupaten Bangka pada tahun 2013 dan 2014 hasil tangkapan ikan sangat baik, kemudian pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan pendapatan hasil tangkapan ikan tahun 2015 menurun 6322.26 ton pada tahun 2016 naik 4253.04 ton jadi 10575.3 ton. Penurunan produksi penangkapan ikan lantaran adanya aktifitas penambangan timah di kawasan laut dengan ini menurunnya pendapatan nelayan karena terumbu karang rusak akibat tertutup lumpur dihasilkan dari limbah penambangan pasir timah di laut jadi hasil tangkapan ikan berkurang.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan timah yang ditujukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, masyarakat, perusahaan, dan pemda. Akan tetapi saat ini belum adanya pemantauan dan perhatian yang pasti dari pemerintah dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi akibat buruk model pengelolaan sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah. Karena dibuktikan pemerintah terlalu mudah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan meskipun secara lingkungan dan sosial ekonomi sesungguhnya tidak layak. Dalam permasalahan ini diperlukannya kebijakan yang tegas pada pengelolaan ekosistem laut untuk mengambil tindakan dan langkah yang cepat untuk menghentikan kegiatan penambangan timah baik yang mendapat izin (legal) atau yang tidak mendapatkan izin (ilegal). Karena Jika terus dibiarkan, maka kerusakan ekosistem laut bertambah parah dan masyarakat pesisir yang akan merasakan dampaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah dilaut. Dengan demikian, Penulis merumuskan **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten**



**Bangka Dalam Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah”** sebagai judul penelitian ini.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat Pertambangan timah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah.
2. Untuk mengetahui dampak kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
  - b. Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperkaya serta menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu pemerintahan, khususnya pemerintah dalam mengatasi masalah kerusakan ekosistem laut terkait dengan masalah lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai acuan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Bangka.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Vatria (2013) Menyebutkan ekosistem pantai memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dikembangkan, salah satunya yaitu keanekaragaman hayati, terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pantai Indonesia sampai sekarang belum bisa ditangani dengan baik. Pada tahun 2008 kasus pencemaran di wilayah pantai sedikitnya terjadi di 8 lokasi yaitu Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Kerusakan ekosistem pantai terjadi diikuti dengan dampak-dampak lingkungan, diantaranya terjadinya abrasi pantai, banjir, sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan, sampai terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil. Hal ini dikarenakan kegiatan penambang yang menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem pantai serta dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu untuk mengatasi kerusakan lingkungan di wilayah pantai tersebut diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, demokratis, berkeadilan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam era

otonomi daerah ini harus mencerminkan adanya keterpaduan antar sektor dan memperhatikan keadilan masyarakat.

Hasil penelitian dari Yustiani, Rusmaya, dan Pratama (2012), Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Oleh Kapal Keruk Terhadap Kualitas Parameter Fisik (Kekeruhan, TSS, Suhu) Air Laut Di Teluk Kealat Belinyu menyimpulkan bahwa kerusakan ekosistem laut diakibatkan karena pengaruh aktivitas pertambangan timah lepas pantai merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem terumbu karang di pulau Bangka. Tidak hanya akibat aktivitas dari Kapal Keruk, tetapi juga oleh Kapal Isap dan TI (Tambang Inkonvensional) Apung yang semakin marak. Proses penambangan dilakukan dengan cara mengeruk dasar laut yang hanya mengandung timahnya, maka pemisahan antara limbah tambang yang meliputi tanah liat, lumpur, tailing, batu dan pasir yang dibuang langsung ke laut tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Sehingga terjadilah air laut menjadi keruh dan semakin meluas ke kawasan lainnya dikarenakan terbawa arus laut. Hal ini kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi izin pertambangan dilaut tanpa melihat dampaknya.

Penelitian lain dilakukan oleh Soewartoyo dan Soetopo tentang Potensi sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Masyarakat Pesisir, kabupaten Bangka (2009) menyebutkan timah merupakan sumber daya alam yang terdapat di Pulau Bangka yang telah dieksploitasi sejak ratusan tahun oleh bangsa Belanda. Mulai adanya kegiatan

penambangan dan pemasaran timah ilegal karena pimpinan daerah, seperti bupati memiliki otoritas memberikan izin usaha pertambangan pada Aktivitas penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung semakin tidak terkendali. Setelah melakukan penambangan di darat yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, kemudian kegiatan penambangan dilakukan di laut. Akibat dari pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas pengerukan dan pembuangan sedimen akan menyebabkan perairan di sekitar penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut akan semakin jauh ke kawasan lainnya jika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun pengerukan tidak dilakukan di sekitar daerah terumbu karang, namun sedimen yang terbawa oleh arus bisa mencapai ke daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat rentan terhadap kekeruhan. Oleh karena itu, ekosistem laut di Bangka sekarang rusak parah. Untuk mengelola sumber daya pesisir dan kelautan perlu peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang tersebut yang antara lain dapat dilakukan melalui pendidikan dan

Penelitian ini mengenai kebijakan pemerintah kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah. Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Hasil penelitian ini memaparkan

kebijakan pertambangan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air Laut yang meliputi: Tujuan pengelolaan lingkungan hidup, Lokasi Pengelolaan, Waktu Pengelolaan dan Pelaksana Pengelolaan dan Pengelolaan Terhadap Limbah B3; dan Hasil Pengukuran Kualitas Air Laut.

### **Perbedaan**

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa penelitian sebelumnya. maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan panduan bagi peneliti dalam melakukan peneliti ini.

- a. Vatria (2013) pada penelitian ini meneliti Berdasarkan perspektif produktivitas biologik, wilayah pesisir mendapat sebutan sebagai “*parabolik domain*” karena mempunyai produktivitas paling tinggi, namun demikian juga rentan dan berpeluang mendapat tekanan dari darat maupun dari laut. Secara ekologis terdapat fenomena dinamis seperti: abrasi, akresi, erosi, deposisi dan intrusi air laut. Di sampan itu, masih terdapat juga fenomena non alamiah seperti: pembabatan hutan *mangrove* untuk pertambakan, pembangunan dermaga/*jetty* untuk pendaratan ikan dan reklamasi pantai. Gejala yang umum terjadi di wilayah ke pesisiran adalah interaksi faktor alam dan aktivitas manusia secara bersamaan, sebagai penyebab adanya degradasi ekosistem.

- b. Yustiani, Rusmaya, dan Pratama (2012), pada penelitian ini meneliti pengaruh pencemaran dari pertambangan timah oleh kapal keruk tradap wilayah pesisir, dan pembuangan limbah tailing ke laut yaitu terhadap Aquaculture, ekosistem, dan daerah tangkapan ikan. Penelitian ini merupakan pengambilan sampel dari akitivitas penambangan setelah itu dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui parameter-parameter fisik dan kimia dengan melewati baku mutu yang terkandung dalam air laut. Sampel yang akan diuji hanya air limbah tailing dari aktivitas kapal keruk saja.
- c. Soewartoyo dan Soetopo (2009), pada peneliti ini meneliti pengembangan sumber daya manusia memiliki posisi strategis jiks diarahkan sesuai dengan potensi sumber daya alam. Ini dikarenakan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik akan mampu menyelamatkan pelastrian lingkungan. Menggunakan pendekatan kuantatif dan kualitatif, penelitia ini menggambarkan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka. Aspek yang dibahas terkait dengan potensi sumber daya alam, yang terkait dengan program pembangunan daerah, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kualitas sumber daya manusia di daerah penelitian membutuhkan peningkatan pendidikan dan keterampilan . Selain itu, pemberdayaan masyarakat didaerah pesisir, melalui peningkatan keterampilan sebagai

antisipasi pasca produksi timah tambangdi Kabupaten Bangka harus dilakukan.

Pada penelitian ini meneliti kebijakan Untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan hukum dalam usaha dan/atau kegiatan menetapkan Izin Lingkungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 09 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Kewenangan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung No 03 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum bahwa pemerintah provinsi sesuai dengan kewenanganya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang kuasa pertambangan sesuai dengan peraturan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Hasil penelitian ini memaparkan isi kebijakan pertambangan laut sebagaimana diatur Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; manfaat Kebijakan; Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air Laut yang meliputi: Tujuan pengelolaan lingkungan hidup,

Lokasi Pengelolaan, Waktu Pengelolaan dan Pelaksana Pengelolaan dan Pengelolaan Terhadap Limbah B3; dan Hasil Pengukuran Kualitas Air Laut.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Wahab (Hosio, 2007) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan ada beberapa pedoman yaitu : Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

- a. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- b. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- c. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- d. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- e. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- f. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- g. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi



- h. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- i. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Sedangkan Rusli (2013) mengatakan, kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk memanejemen masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan *legitimate* karena didasari regulasi yang jelas. Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan public bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki.

Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang

secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam merespon suatu masalah publik. Dye menyatakan bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan Rose mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Sedangkan pengertian dan pemahaman akan kebijakan public yang dikemukakan oleh Friedrich menegaskan kebijakan public sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno,2013).

Nugroho (2004) berpendapat bahwa kebijakan Publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan dapat disimpulkan kebijakan public adalah suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi. Bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk membangun daya saing dan mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

#### **b. Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci (Nurdin, 2013). Meter dan Horn (dalam Winarno, 2008:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Winarno, 2013).

Agustino berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Kemudian Meter dan Horn (Suharno, 2010) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Menurut teori Meter dan Horn, dalam pandangannya mengemukakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan standard dan tujuan kebijakan

sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut.

2. Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu .
3. Hubungan antarorganisasi diperlukan guna mengembangkan jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung implementasi kebijakan.
4. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup sumber daya lingkungan, yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak); bagaimana sifat opini

publik yang ada dilingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal penting, yaitu : 1) respon implementor terhadap kebijakan yang berimplikasi pada kemauan untuk melaksanakan kebijakan; 2) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; 3) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Grindle 1980 (Dalam Mutiarin 2014) menyatakan bahwa proses umum implementasi dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dispesifikasikan, program-program telah didesain, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar (*the Content of policy*) dan konteks kebijakan (*the context od policy*) yang terkait dengan formulasi kebijakan. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah

dari sebuah kebijakan. Suatu program yang berujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit dan bantuan beras kepada kelompok miskin; (4) apakah letak sebuah program udah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam pandangan Shabbir dan Dennis (Dalam Suharno, 2013), ada empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Sedangkan Weimer dan Vining (Dalam Suharno, 2013), memiliki pandangan lain. Menurut mereka ada tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Logika Kebijakan

Yang dimaksud dengan logika ini adalah bahwa kebijakan yang ditetapkan harus masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoretis.

b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Sebuah kebijakan bisa sukses ketika diterapkan di sebuah lingkungan, tetapi tidak berarti bahwa kebijakan yang sama akan memiliki tingkat sukses yang sama ketika diterapkan di lingkungan yang berbeda. Artinya, kondisi lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan yang dimaksudkan di sini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan atau geografis.

c. Kemampuan implementor kebijakan



Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kompetensi dan keterampilan dari implementor. Dengan kata lain semakin kompeten implementor sebuah kebijakan, maka potensi suksesnya implementasi kebijakan juga semakin tinggi.

## **1.6.2 Pengelolaan Ekosistem**

### **a. Pengertian Pengelolaan Ekosistem**

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Usman bahwa management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus (Hardyanti, 2012). Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto, 1997).

Fattah, (2011) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian

(organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu *Pertama*, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. *Kedua*, proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. *Ketiga*, Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan (Sule dan Saefullah. 2009).

Beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Koontz dan O'donnel menyatakan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Sedangkan Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Pengertian dan pemahaman akan manajemen oleh Stoner menegaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Lee berpendapat bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Heriyanto, 2009).

Manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh seorang manajer dalam kegiatan manajerialnya. Sehingga kegiatan manajerial yang dilakukan oleh manajer tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan proses manajemen. Proses tersebut bermula dari pembuatan perencanaan sampai pada pengadaan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan rencana sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Arif dan Zulkarnain, 2008).

Sedangkan Ekosistem adalah satu kelompok yang mempunyai ciri khas tersendiri yang terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda.

pengertian ekosistem terdapat dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 32 tahun 2009, yaitu ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa syarat terbentuknya ekosistem ialah adanya keteraturan hubungan dan ketergantungan antar sub-ekosistem. Di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Dengan kata lain Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik (makhluk hidup) maupun abiotik (non makhluk hidup). Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem diartikan sebagai tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu yang bersifat dinamis. Artinya, bisa terjadi

perubahan, baik besar maupun kecil, yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun akibat ulah manusia (Utomo, 2014).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ekosistem adalah suatu proses atau tindakan manusia yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dikelola dengan bijaksana, terpadu, dan berkelanjutan.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Dalam definisi konseptual, peneliti menggunakan teori Grindle 1980 (Dalam Mutiarin 2014) menyatakan bahwa proses umum implementasi dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dispesifikasikan, program-program telah didesain, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar (*the Content of policy*) dan konteks kebijakan (*the context od policy*) yang terkait dengan formulasi kebijakan. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

A. Isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau

pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah dari sebuah kebijakan. Suatu program yang berujuan mengubah sikap dan prilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit dan bantuan beras kepada kelompok miskin; (4) apakah letak sebuah program udah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

B. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### **1.8 Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti menggunakan teori Grindle, terdapat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Kebijakan Pertambangan

- b. Izin Pembuangan Limbah
- c. Upaya Pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran Air Laut
- d. Pengelolaan Terhadap Limbah B3
- e. Hasil Kebijakan

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Menurut Keirl dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2004) dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney (dalam Nazir, 2003) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Selain itu juga mendeskripsikan suatu kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dengan mengumpulkan

informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi. Kemudian melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil bukan berbentuk angka-angka tetap berupa gambaran dan kata-kata. Penelitian ini akan mengungkapkan masalah-masalah kerusakan-kerusakan ekosistem laut dan kebijakan pemerintah kabupaten Bangka dalam Pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bangka

### **1.9.3 Unit Analisis Data**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75-76).

Unit analisis dalam penelitian ini menetapkan kriteria responden yang akan menjadi subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka dalam Pengelolaan ekosistem laut akibat Pertambangan timah, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Bupati atau Wakil Bupati dan Badan Lingkungan Hidup (BLHD). Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang tepat untuk dijadikan sumber data sesuai dengan permasalahan penelitian ini.



#### 1.9.4 Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dan mengetahui terhadap penelitian tersebut. Melalui data primer ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

**Tabel 1.5**

**Data Primer Penelitian**

<b>Nama Data Teknik</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Pengumpulan data</b>
Kebijakan Pertambangan Laut	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Bangka Belitung dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara</li></ul>
Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air Laut	PT Timah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara</li><li>• Observasi</li></ul>
Hasil Pengukuran Kualitas Air Laut	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT Timah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara</li></ul>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perundang-undangan, laporan-laporan, internet, dan berbagai dokumen-dokumen yang dapat mendukung topic penelitian.

**Tabel 1.6**  
**Data Sekunder Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pengganti Dari Uu No. 11 / 67 Tentang Pokok-Pokok Usaha Pertambangan	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Bangka Belitung
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 09 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan	Badan lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung
Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung No 03 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Bangka Belitung

### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang lebih jelas.

Wawancara akan diajukan kepada:

**Tabel 1.7**

**Daftar Narasumber**

No	Nama Narasumber	Intansi/Jabatan
1	Bapak Ceppy Nugraha	Kepala BLHD
2	Bapak Suranto Wibowo	Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
3	Bapak Fizaladi	Karyawan PT Timah
4	Bapak Laboca	Nelayan
5	Bapak Hatta	Tokoh Masyarakat

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung suatu kejadian dilapangan terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Tanjung Putat Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, dengan pengamatan dan mencatat hal-hal apa saja yang ditemukan selama penelitian berlangsung untuk mendukung penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Hamidi, 2004:72). Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengambil data dari sumber tertulis berupa buku, jurnal, laporan, perundang-undangan, kebijakan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Analisa Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa dengan obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data diperoleh dari informan sesuai dengan objek yang diteliti kemudian digambarkan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen-dokumen yang terkait. Hasil tersebut dirangkai untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.